

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya untuk memperbaiki kehidupan. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu rangkaian usaha atau kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, memperbaiki hubungan antar wilayah dan mengubah sektor ekonomi dari primer menjadi tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ini adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan, tingkat kesejahteraan, dan tingkat pemerataan dengan sebaik mungkin. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat mengukur keberhasilan pembangunan dan perekonomian (Ma'ruf & Wihastuti, 2008).

Sukirno (2011) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan suatu kegiatan perekonomian yang dapat menghasilkan pendapatan masyarakat bertambah dan menghasilkan barang dan jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan perekonomian kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan mengalami peningkatan. Pada dasarnya setiap daerah mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang mengalami pertumbuhan lambat, adapula yang mengalami laju pertumbuhan cepat dan laju pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

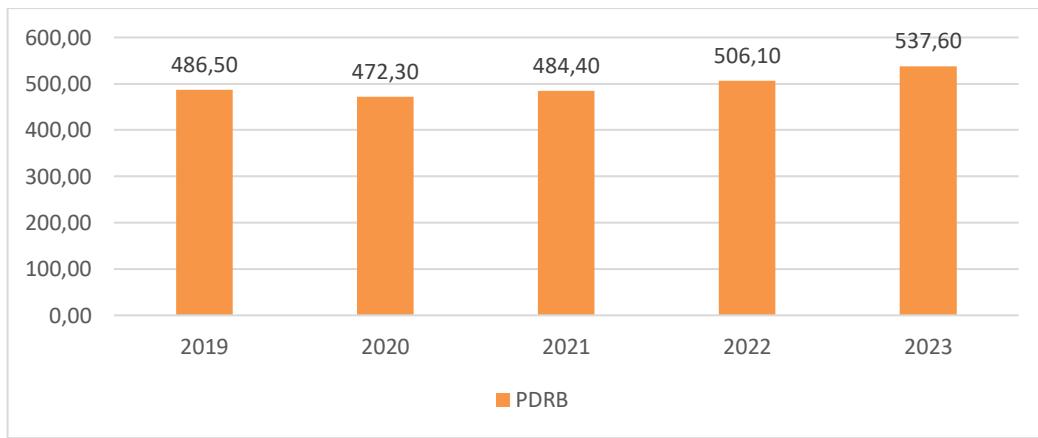
Pada umumnya pembangunan ekonomi pada negara berkembang

ditekankan pada sektor ekonomi karena sektor ini berperan penting dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan. Alasannya karena di bidang ekonomi akan mendorong pencapaian tujuan serta pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi (Wihda & Poernomo, 2014).

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya (Putri, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan (Dewi & Sutrisna, 2015).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan

sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, seperti batu bara, minyak, gas bumi, dan perkebunan kelapa sawit. Kekayaan alam ini membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. PDRB, sebagai indikator utama yang mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah, memberikan gambaran kinerja ekonomi serta tingkat kesejahteraan di Kalimantan Timur. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, sektor pertambangan, penggalian, dan perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB provinsi ini. Pada tahun 2022, PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar 506.00 miliar rupiah berdasarkan harga berlaku, dengan sektor pertambangan menyumbang lebih dari 40% dari total PDRB. Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor ekstraktif masih sangat tinggi. Berikut merupakan gambaran PDRB di provinsi kalimantan timur selama 2012-2023 dalam sebuah gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023 (Triliun Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat secara keseluruhan. Pada tahun 2019, PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar 486,5 triliun rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 472,3 triliun rupiah yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Namun, pemulihan ekonomi mulai terlihat pada tahun 2021 dengan PDRB kembali naik ke angka 484,4 triliun rupiah, diikuti dengan pertumbuhan pada 2022 sebesar 506,1 triliun rupiah, dan mencapai puncaknya pada 2023 dengan nilai 537,6 triliun rupiah.

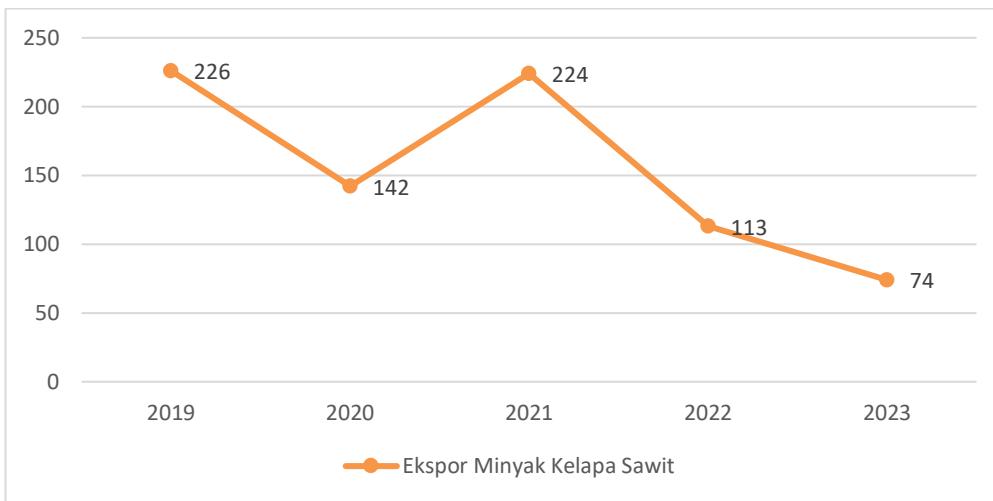
Peningkatan PDRB Kalimantan Timur yang konsisten dan signifikan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di provinsi tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama, investasi yang mengalir, serta perbaikan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung aktivitas ekonomi.

Pada tahun 2023, PDRB Kalimantan Timur tercatat sebesar **540.000** miliar rupiah. Berdasarkan harga berlaku, dengan sektor pertambangan menyumbang lebih dari 40% dari total PDRB. Angka ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor ekstraktif masih sangat tinggi. Ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit terus menjadi sumber utama pendapatan daerah, dengan pasar utama di negara-negara Asia seperti China dan India yang permintaan energinya tetap

tinggi. Meskipun demikian, fluktuasi harga komoditas global menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, karena harga batu bara dan minyak sawit yang naik turun di pasar internasional berpengaruh langsung terhadap pendapatan daerah dan nilai PDRB.

Menurut Limanseto (2021) perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis pada pembangunan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan industri minyak kelapa sawit berhubungan dengan sektor pertanian yang banyak berkembang di negara-negara tropis seperti Indonesia, Thailand serta Malaysia. Prospek perkembangan industri ini sangat pesat, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama dari Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur berkembang pesat karena iklim tropis yang mendukung dan ketersediaan lahan yang luas. Industri kelapa sawit tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berperan sebagai salah satu penopang utama ekspor Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Minyak kelapa sawit dari provinsi ini dieksport ke berbagai negara, terutama di Asia, Eropa dan Amerika Serikat, yang menggunakan minyak kelapa sawit dalam industri makanan, kosmetik dan energi (*biofuel*). Berikut data Ekspor minyak Kelapa Sawit di provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

**Gambar 1.2 Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2023 (Juta USD)**

Berdasarkan gambar 1.2 ekspor minyak kelapa sawit Provinsi Kalimantan Timur, terlihat adanya fluktuasi dalam jumlah ekspor dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, ekspor minyak kelapa sawit tercatat sekitar USD 226 juta. Nilai ini kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sekitar USD 142 juta. Pada tahun 2021, ekspor meningkat kembali mencapai sekitar USD 224 juta, menyamai capaian tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2022, ekspor menurun menjadi sekitar USD 113 juta, dan kembali turun pada tahun 2023 dengan nilai ekspor sebesar sekitar USD 74 juta. Secara keseluruhan, dalam periode 2019–2023, nilai ekspor minyak kelapa sawit menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam dua tahun terakhir.

Faktor yang memengaruhi ekspor minyak kelapa sawit adalah meningkatnya tekanan dari negara-negara Eropa untuk menerapkan kebijakan impor yang ketat karena konsekuensi lingkungan dan keberlanjutan. Uni Eropa, misalnya, memberlakukan aturan yang melarang impor produk berbasis kelapa

sawit yang dianggap menyebabkan *deforestasi*. Ini pasti berdampak langsung pada permintaan minyak kelapa sawit Indonesia di seluruh dunia, termasuk dari Provinsi Kalimantan Timur. Produsen kelapa sawit dipaksa untuk memenuhi standar keberlanjutan yang lebih ketat dari Uni Eropa, yang sering memerlukan peningkatan biaya dan investasi dalam proses produksi yang lebih ramah lingkungan.

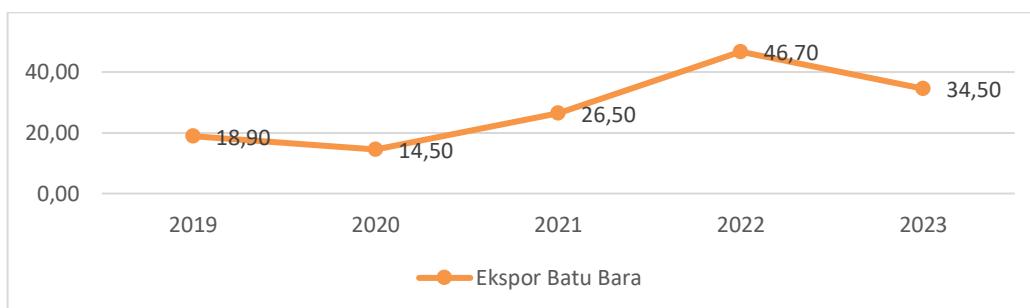
Selain itu, permintaan global terhadap minyak kelapa sawit turut dipengaruhi oleh perubahan preferensi konsumen yang cenderung beralih ke minyak nabati alternatif, seperti minyak biji bunga matahari dan minyak kedelai yang dianggap lebih ramah lingkungan. Pergeseran ini meningkatkan persaingan di pasar global bagi minyak kelapa sawit. Di sisi lain, fluktuasi harga minyak mentah dunia juga berpengaruh terhadap harga minyak kelapa sawit, mengingat adanya korelasi harga antara kedua komoditas tersebut.

Pada tingkat nasional, kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk penerapan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar dalam negeri, memiliki dampak signifikan terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga minyak goreng domestik, namun membatasi kuantitas minyak kelapa sawit yang dapat dieksport, sehingga berimplikasi pada penurunan pendapatan ekspor. Selain itu, ketidakpastian harga kelapa sawit di pasar domestik, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan fluktuasi permintaan internasional, memperbesar tantangan bagi produsen minyak kelapa sawit di Indonesia.

Batubara merupakan sumber daya penting untuk pembangkitan tenaga

listrik, Indonesia sebagai salah satu negara produsen batubara terbesar di dunia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa batu bara menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur ekspor nasional, terutama bagi daerah-daerah penghasil seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan (BPS, 2022). Produksi batubara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan permintaan luar negeri (Azizah A' & Soelistyo, 2022)

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan regional. Ekspor batu bara dari daerah ini telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena global seperti transisi energi dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat telah mempengaruhi permintaan batu bara di pasar internasional. Misalnya, banyak negara mulai beralih ke energi terbarukan sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi karbon, yang berdampak pada harga dan volume ekspor batu bara Indonesia. Berikut data Ekspor batu bara di provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

Gambar 1.3 Ekspor Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023(Juta USD)

Berdasarkan gambar 1.3 ekspor batu bara Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir, Pada tahun 2019, ekspor batu bara tercatat sekitar 18 juta USD.

Namun, pada tahun 2020, ekspor mengalami penurunan menjadi sekitar 14 juta USD. Pada tahun 2021, ekspor kembali meningkat secara signifikan mencapai 26 juta USD. Peningkatan ekspor berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah ekspor batu bara mencapai angka tertinggi sebesar 46 juta USD. Namun, pada tahun 2023, ekspor mengalami penurunan kembali menjadi sekitar 34 juta USD, meskipun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 2022.

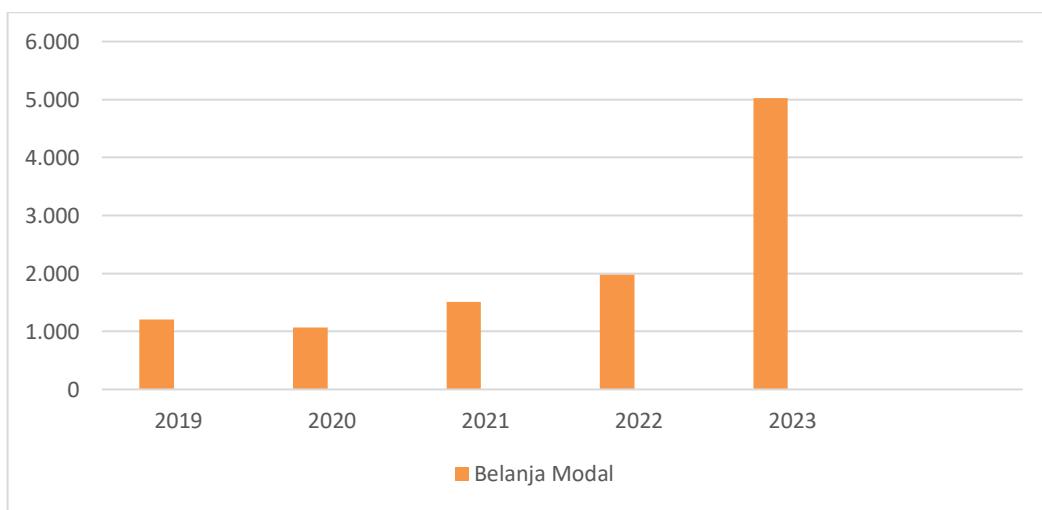
Lonjakan ini dipengaruhi oleh kenaikan tajam harga batu bara akibat krisis energi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, serta meningkatnya permintaan energi fosil sebagai alternatif gas alam.

Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan nilai ekspor menjadi sekitar 40 juta USD. Penurunan ini mencerminkan dampak dari perlambatan ekonomi global, khususnya di Tiongkok, yang merupakan salah satu konsumen utama batu bara Kalimantan Timur. Selain itu, tren transisi energi global menuju penggunaan sumber daya terbarukan juga mulai memengaruhi permintaan batu bara di pasar internasional.

Fluktuasi nilai ekspor menunjukkan pentingnya peran batu bara sebagai kontributor utama PDRB Kalimantan Timur. Namun, ketergantungan ekonomi pada sektor ini juga memperlihatkan kerentanan terhadap dinamika harga global dan kebijakan energi internasional. Oleh karena itu, upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan hilirisasi batu bara menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi provinsi di masa depan.

Belanja modal merupakan komponen krusial dalam anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan investasi jangka panjang, seperti

pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan aset lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat. Di Provinsi Kalimantan Timur, belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berikut data belanja modal di provinsi Kalimantan Timur periode 2012-2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

Gambar 1.4 Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2012-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.4 belanja modal Provinsi Kalimantan Timur tahun 5 tahun terakhir, menggambarkan Belanja modal Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, Pada tahun 2019, belanja modal tercatat sekitar 1.207 miliar rupiah. Pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi sekitar 1.066 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021, belanja modal meningkat kembali mencapai sekitar 1.514 miliar rupiah. Pada tahun 2022, nilai belanja modal naik menjadi sekitar 1.980 miliar rupiah. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2023, di mana belanja

modal melonjak hingga mencapai sekitar 5.023 miliar rupiah. Secara keseluruhan, periode 2019–2023 menunjukkan pola peningkatan yang kuat dalam belanja modal, terutama pada dua tahun terakhir. Peningkatan belanja modal yang signifikan pada tahun 2023 mencerminkan dorongan investasi besar, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam rangka persiapan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta penguatan sektor ekonomi lokal (BPS Kalimantan Timur, 2023).

Namun, di balik pertumbuhan belanja modal yang pesat, beberapa permasalahan masih muncul terkait efektivitas alokasi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan distribusi belanja modal, di mana sebagian besar alokasi anggaran masih terpusat pada pembangunan infrastruktur besar dan proyek strategis nasional, sementara sektor ekonomi lain seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah belum mendapatkan porsi yang optimal (Universitas Pertamina, 2023). Selain itu, peningkatan belanja modal yang tajam perlu diimbangi dengan efisiensi dalam pelaksanaan proyek, mengingat risiko keterlambatan pembangunan, pembengkakan biaya, serta potensi ketidaktepatan sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Kemenkeu, 2024).

Selain itu, dampak dari lonjakan belanja modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur juga perlu dicermati lebih lanjut. Meskipun investasi infrastruktur berpotensi meningkatkan PDRB melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi daerah, tantangan lain seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka 6,37% pada 2023 serta

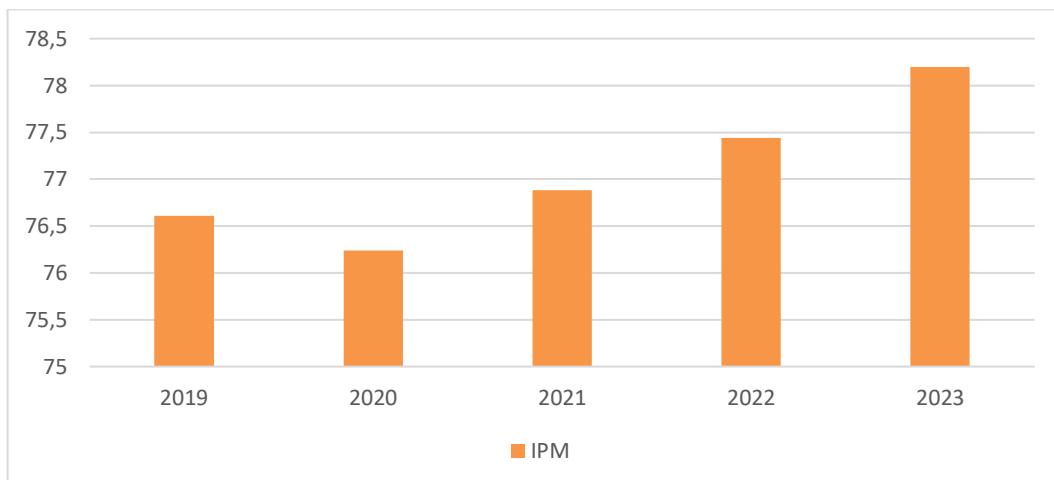
ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat menghambat efektivitas belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kemenkeu, 2024). Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih terarah dalam alokasi belanja modal, termasuk diversifikasi investasi ke sektor-sektor produktif di luar pertambangan serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat lokal, agar pertumbuhan PDRB tidak hanya bergantung pada proyek infrastruktur jangka pendek tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Proses pembangunan meliputi berbagai perubahan dalam berbagai aspek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga pembangunan merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan suatu negara (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan refleksi dari pembangunan manusia secara menyeluruh, serta nilai indikatornya mencerminkan sudut pandang lain dalam sebuah pembangunan yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, tetapi dilihat dari capaian pembangunan kualitas hidup manusia yang diukur dari aspek-aspek kehidupan dasar. Penghitungan nilai IPM disusun secara terstruktur dimulai dari tingkat nasional, provinsi serta tingkat kabupaten/kota.

Penyusunan secara terstruktur ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti peringkat, nilai, dan disparitas pembangunan antar daerah. Indikator yang digunakan dalam penyusunan IPM yaitu terdiri dari dimensi kesehatan diukur dengan kriteria umur panjang dan hidup sehat, dalam dimensi pendidikan diukur dengan kriteria lama sekolah, dan dalam dimensi ekonomi diukur dengan

pengeluaran perkapita (Nugraeni & Aji, 2021). Berikut ini adalah perkembangan realisasi Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kalimantan Timur dari tahun 2012-2023:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2024 (data diolah)

**Gambar 1.6 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012-2023 (Persen)**

Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam persen dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun mengalami peningkatan secara keseluruhan. Pada tahun 2019, IPM tercatat di angka sekitar **76,6**, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi **76,2** yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Setelah itu, IPM kembali meningkat pada 2021 menjadi **76,8**, terus bertumbuh hingga **77,5** pada 2022, dan mencapai **78,3** pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat yang menjadi indikator utama dalam pengukuran IPM. Namun, di balik peningkatan tersebut, terdapat

tantangan-tantangan signifikan yang masih perlu diatasi.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kesenjangan kualitas pembangunan antarwilayah di Kalimantan Timur. Meski secara keseluruhan IPM meningkat, tidak semua daerah di provinsi ini merasakan manfaat yang sama. Wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan menunjukkan IPM yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah pedalaman, yang masih menghadapi kendala akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kesenjangan ini dapat menghambat potensi pemerataan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Selain itu, tingginya ketergantungan Kalimantan Timur pada sektor sumber daya alam, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit, menciptakan risiko keberlanjutan. Meski sektor ini berkontribusi besar terhadap PDRB dan mendukung program-program pembangunan, fluktuasi harga komoditas global sering kali memengaruhi stabilitas ekonomi daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kecepatan peningkatan IPM.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah isu lingkungan dan dampak pembangunan ibu kota baru Nusantara. Proyek besar ini memang memberikan peluang untuk mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menimbulkan risiko kerusakan lingkungan, seperti *deforestasi* dan penurunan kualitas air, yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menghambat pertumbuhan IPM dalam jangka panjang.

Pada penelitian ini, terdapat kesenjangan (*research gap*) antara hasil studi

sebelumnya. Ketimpangan ini terlihat dari adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dalam jurnal-jurnal sebelumnya yang membahas topik yang sama. Beberapa studi menghasilkan temuan yang berbeda, dengan beberapa menemukan hubungan positif antara variabel, sementara yang lain menemukan hubungan negatif atau tidak signifikan. Selain itu, dalam penelitian ini, kebaruan (*novelty*) terletak pada penggunaan kombinasi variabel seperti ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia secara bersamaan, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini akan fokus pada tahun-tahun terkini, di mana dinamika ekonomi dan sosial mengalami perubahan signifikan, sehingga diharapkan penggunaan ketiga variabel tersebut secara bersamaan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto seperti dana ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia (IPM). Faktor-faktor tersebut memiliki perbedaan perkembangan pada setiap tahunnya, terdapat beberapa variabel yang menunjukkan peningkatan sedangkan variabel lain menunjukkan penurunan pada tahun yang sama. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ekspor Minyak Kelapa Sawit, Ekspor Batu Bara, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.
2. Bagaimana pengaruh ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia secara bersama sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.
2. Mengetahui pengaruh ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia secara bersama sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

- 1. Bagi penulis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti pengaruh ekspor minyak kelapa sawit, ekspor batu bara, belanja modal dan indeks pembangunan manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2023.

- 2. Bagi akademisi**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terutama bagi para akademisi ekonomi pembangunan untuk dapat terus memperkaya pengetahuannya.

- 3. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi kebijakan yang berkaitan dengan tentang pengaruh ekspor, belanja modal dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- 4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan mengambil data dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Website tersebut menyajikan data-data yang valid mengenai perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dirancang agar setiap tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan, dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu serta menghasilkan skripsi yang berkualitas.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian